



▶ Sekda: Sudah 11 Tahun Belum Disesuaikan

SINTANG, SP - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang memastikan tidak mengikuti langkah 104 kabupaten/kota di Indonesia yang menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), akibat efisiensi dan pengurangan dana transfer ke daerah yang dilakukan pemerintah pusat.

“Pemerintah Kabupaten Sintang belum akan melakukan penyesuaian tarif baru

terhadap PBB-P2 di Kabupaten Sintang,” tegas Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sintang, Kartiyus saat menerima Tim Auditor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Barat (Kalbar) di Ruang Rapat Sekda, Senin (25/8).

Auditor BPK Kalbar datang ke Sintang dalam rangka memeriksa pengelolaan pendapatan di Kabupaten Sintang. Hadir pada

Entri Meeting Pemeriksaan BPK Kalbar tersebut sebanyak 13 orang pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemkab Sintang yang mengelola pendapatan di Pemkab Sintang dan Inspektur Kabupaten Sintang.

“Kita (Sintang, red) terakhir menetapkan nilai PBB P2 itu 2014 atau 11 tahun lalu. Dan sampai sekarang belum pernah diubah atau dinaikan. Kita tidak ingin

menaikkan pendapatan asli daerah dengan membebani masyarakat kita yang secara ekonomi juga mengalami penurunan,” terang Kartiyus.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sintang, ujar Sekda Kartiyus, hingga kini memberikan kontribusi pada APBD baru mencapai 8 persen. Tahun ini ada efisiensi, tahun 2026 akan ada pengurangan dana transfer ke daerah. Dan

ada kewajiban daerah untuk mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lagi. Sehingga kasian kepada Bupati dan Wakil Bupati Sintang yang baru, karena dana untuk pembangunan tidak ada.

“Kita akan mengefektifkan sumber PAD yang ada saja dulu. Kita pelajari mengapa belum efektif, lalu kita carikan solusi yang baik, sehingga PAD kita bisa semakin naik. Kepada 13 OPD

yang mengelola PAD, agar pasang target yang realistis, jangan memaksakan diri, sehingga melanggar aturan,” pesannya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Sintang, Selimin menjelaskan, Pemkab Sintang pernah melakukan penyesuaian tarif PBB P2 saat penyerahan pengelolaan PBB P2 dari KPP Pratama Sintang ke Pemkab Sin-

tang pada 11 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2014.

“Sebelum 2014 itu kan PBB P2 masih dikelola oleh KPP Pratama Sintang. Kemudian 2014 dilakukan penyerahan pengelolaan kepada Pemkab Sintang, sehingga dilakukan penyesuaian tarif PBB P2. Dan sejak itu, sampai sekarang kita belum melakukan penyesuaian tarif PBB P2 secara massal,” terang Selimin. (rls)